



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrua pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 38);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 40);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.310.069.237.292,04
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.940.311.823.627,00
c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 600.258.343.092,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp. 3.850.639.404.011,04

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 1.586.718.027.514,74
2) Belanja Hibah	Rp. 150.112.571.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 41.911.200.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 96.942.365.900,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 485.948.803.465,30
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp. 2.364.632.967.880,04
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 124.840.902.548,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 868.222.260.662,00
3) Belanja Modal	<u>Rp. 911.483.241.169,00</u>
Jumlah belanja langsung	<u>Rp. 1.904.546.404.379,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 4.269.179.372.259,04
Surplus/(defisit)	<u>(Rp. 418.539.968.248,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 431.439.968.248,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 12.900.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 418.539.968.248,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan dan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dicantumkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 103

NOREG PERBUP : 103 TAHUN 2016

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR: 103 Tahun 2016

TANGGAL: 30 Desember 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor Unit			Uraian	Jumlah
1			2	3
			PENDAPATAN DAERAH	3.850.639.404.011.04
			Pendapatan Asli Daerah	1.310.069.237.292.04
		. 1	Hasil Pajak Daerah	794.975.000.000.00
		1 . 1	Pajak Hotel	12.500.000.000.00
		. 1 . 1. 1	Hotel Bintang Tiga	6.400.000.000.00
		1 . 1. 2	Hotel Bintang Dua	3.000.000.000,00
		1 . 1. 3	Hotel Melati Tiga	2.500.000.000.00
		1 . 1. 4	Hotel Melati Dua	30.000.000,00
		1 . 1. 5	Cottage	60.000.000.00
		1 . 1. 6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	450.000.000,00
		1 . 1. 7	Wisma Pariwisata	60.000.000.00
		1 2	Pajak Restoran	61.000.000.000.00
		1 2. 1	Restoran	29.700.000.000.00
		1 2. 2	Rumah Makan	6.000.000.000.00
		1 2. 3	Cafe	7.000.000.000,00
		1 2. 4	Kantin	100.000.000.00
		1 2. 5	Katering	16.000.000.000.00
		1 2. 6	Waning	2.200.000.000.00
		1 3	Pajak Hiburan	7.000.000.000.00
		1 3. 1	Tontonan Film/Bioskop	2.000.000.000,00
		1 3. 2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	17.000.000,00
		1 3. 3	Karaoke	1.650.000.000,00
		1 3. 4	Permainan Bilyar	25.000.000,00
		1 3. 5	Permainan Ketangkasan	3.000.000.000.00
		1 3. 6	Panti Pijat/Refleksi	273.000.000.00
		1 3. 7	Pertandingan Olahraga	35.000.000.00

. 1	. 1. 4	Pajak Reklame	10.000.000.000,00
. 1	. 1. 4. 1	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	8.150.000.000,00
. 1	. 1. 4. 2	Reklame Kain	1.330.000.000,00
. 1	. 1. 4. 3	Reklame Berjalan	40.000.000,00
. 1	1. 4. 4	Reklame Baliho (Vinyl / Colibrate)	480.000.000,00
1	1. 5	Pajak Penerangan Jalan	237.800.000.000,00
1	1. 5. 1	Pajak Penerangan Jalan PLN	225.500.000.000,00
. 1	. 1. 5. 2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	12.300.000.000,00
1	1. 6	Pajak Parkir	16.000.000.000,00
. 1	1. 6. 1	Pajak Parkir	16.000.000.000,00
1	1. 7	Pajak Air Tanah	1.800.000.000,00
1	1. 7. 1	Pajak Air Tanah	1.800.000.000,00
1	1. 8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	191.500.000.000,00
1	1. 8. 1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	191.500.000.000,00
1	1. 9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	257.375.000.000,00
1	1. 9. 1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	257.375.000.000,00
1	2	Hasil Retribusi Daerah	94.920.694.000,00
1	2. 1	Retnbusi Jasa Umum	27.216.614.000,00
1	2. 1. 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.657.544.000,00
1	2. 1. 2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.207.400.000,00
1	2. 1. 3	Retribusi Pelayanan Pasar	12.012.500.000,00
1	2. 1. 4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.073.370.000,00
1	2. 1. 5	Retribusi Pemeriksaan Atat Pemadam Kebakaran	265.800.000,00
1	2. 1. 6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.000.000.000,00
1	2. 2	Retribusi Jasa Usaha	34.768.088.500,00
1	2. 2. 1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.917.598.000,00
1	2. 2. 2	Retribusi Terminal	781.625.000,00
1	2. 2. 3	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.640.000.000,00
1	2. 2. 4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.509.605.500,00
1.	2. 2. 5	Retribusi Parkir	28.919.260.000,00
1.	2. 3	Retribusi Perizinan Tertentu	32.935.991.500,00
1.	2. 3. 1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.561.711.500,00
1.	2. 3. 2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	3.300.000.000,00
1.	2. 3. 3	Retribusi Izin Trayek	62.280.000,00
1.	2. 3. 4	Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Memperkeriakan Tenaga Asing)	4.012.000.000,00

1 • 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.447.734.565,97
1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	28.447.734.565.97
1 . 3. 1. 1	Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	6.100.000.000,00
1 . 3. 1. 2	PD Aneka Usaha	525.250.000,00
1 . 3. 1. 3	BPR "Delta Artha"	5.100.000.000,00
1 . 3. 1. 4	Bank Jatim	16.722.484.565.97
1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	391.725.808.726,07
1.4.1	Penerimaan Jasa Giro	9.161.441.922,07
1 . 4. 1. 1	Jasa Giro Kas Daerah	9.161.441.922,07
1 . 4. 2	Pendapatan Bunga Deposito	5.000.000.000.00
1.4.2.1	Rekening Deposito Pada Bank Jatim	5.000.000.000,00
1.4.3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	650.000.000,00
1 . 4. 3. 1	Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UKM	500.000.000,00
1 . 4. 3. 2	Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari pembetian Gabah Petani	108.000.000,00
1 . 4. 3. 3	Penerimaan dari bunga dana bergulir dari UPPKS	18.000.000,00
1 . 4. 3. 4	Penerimaan dari Bunga Dana Bergulir dari P3EL	24.000.000,00
1.4.4	Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	4.898.534.732,00
1.4.4. 1	Pendapatan dari Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.441.246.800,00
1 . 4. 4. 2	Pendapatan dari Sewa Tanah/Lahan	102.287.932,00
1 . 4. 4. 3	Pendapatan dari sewa rusunawa	2.355.000.000.00
1.4.5	Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	605.848.832,00
1 . 4. 5. 1	Pendapatan dari Kontribusi PT. Bumi Citra Properindo	71.500.000,00
1 . 4. 5. 2	Pendapatan dari Kontribusi PT. Setia Mandiri Mitratama, Tbk. (Putt-putt)	30.848.832.00
1 . 4. 5. 3	Pendapatan dari Kontribusi PT. Indraco (Sunctty Plaza)	150.000.000,00
1 . 4. 5. 4	Pendapatan dari Pengelolaan Rusunawa Ds. Tambaksawah - Waru	345.000.000,00
1 . 4. 5. 5	Pendapatan dari Kontribusi Sewa Tambak Akademi Perikanan	8.500.000,00
1.4.6	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	291.600.000.000.00
1 . 4. 6. 1	Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD	291.600.000.000.00
1.4.7	Penjualan Hasil Perikanan	240.210.000,00
1.4. 7. 1	Penjualan Hasil Perikanan	240.210.000,00
1.4.8	Penjualan Hasil Raskin	673.600.000,00
1 . 4. 8. 1	Penjualan Hasil Raskin	673.600.000.00
1.4.9	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	68.757.787.740,00
1 . 4. 9. 1	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ganting	1.208.859.372,00
1 . 4. 9. 2	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sidoarjo	3.030.770.853,00

1 . 4. 9. 3	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sekardangan	1.203.022.458,00
1 . 4. 9. 4	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Urangagung	1.189.991.699,00
1 . 4. 9. 5	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Buduran	2.406.436.118,00
1.4.9.6	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Candi	3.764.038.015,00
1.4.9.7	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Porong	1.978.120.596,00
1 . 4. 9. 8	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kedungsolo	1.854.321.287,00
1 . 4. 9. 9	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jabon	1.913.704.800,00
1 . 4. 9.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krembung	3.642.277.519,00
1 . 4. 9.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tanggulangin	2.305.139.445,00
1 . 4. 9.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tulangan	1.898.193.904,00
1 . 4. 9.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kepadangan	1.169.006.126,00
1 . 4. 9.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Taman	5.480.936.478,00
1 . 4. 9.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Trosobo	1.853.328.183,00
1 . 4. 9.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Waru	3.735.136.008,00
1 . 4. 9.17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Medaeng	1.537.390.662,00
1 . 4. 9.18	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sedati	2.631.231.970,00
1 . 4. 9.19	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gedangan	1.765.144.995,00
1 . 4. 9.20	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sukodono	2.824.068.925,00
1 . 4. 9.21	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Krian	4.338.613.117,00
1 . 4. 9.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Barengkrajan	1.846.331.885,00
1.4. 9.23	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Balongbendo	3.711.119.320,00
1 . 4. 9.24	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Wonoayu	3.063.771.934,00
1 . 4. 9.25	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tank	4.907.235.437,00
1 . 4. 9.26	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Prambon	3.499.596.632,00
1 . 4.10	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP	10.138.385.500,00
1 . 4.10. 1	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Urangagung	20.000.000,00
1 . 4.10. 2	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Candi	25.000.000,00
1 . 4.10. 3	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Porong	407.520.000,00
1 . 4.10. 4	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Jabon	164.875.000,00
1 . 4.10. 5	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Krembung	525.327.000,00
1 . 4.10. 6	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Tanggulangin	80.000.000,00
1 . 4.10. 7	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Tulangan	80.000.000,00
1 . 4.10. 8	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Taman	600.000.000,00
1 . 4.10. 9	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Waru	185.000.000,00
1 . 4.10.10	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Medaeng	24.000.000,00

1 . 4.10.11	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Sedati	150.000.000,00
1 . 4.10.12	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Sukodono	411.000.000.00
1 . 4.10.13	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Krian	600.000.000.00
1 . 4.10.14	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Barengkrajan	152.160.000.00
1 . 4.10.15	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Balongbendo	405.000.000.00
1 . 4.10.16	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Wonoayu	399.276.000,00
1 . 4.10.17	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Tarik	576.040.000,00
1 . 4.10.18	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP Prambon	420.000.000,00
1 . 4.10.19	Dana lain-lain Non Kapitasi JKN	4.911.187.500,00
2	Dana Perimbangan	1.940.311.823.627,00
2 - 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	155.827.511.627,00
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	128.244.056.627.00
2.1.1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	25.184.244.000.00
2.1. 1.2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21	92.406.225.000.00
2.1.1.3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	10.653.589.627.00
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.583.453.000.00
2.1.2. 1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	206.187.000,00
2. 1. 2. 2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.934.000.00
2. 1. 2. 3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00
2. 1. 2. 4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	24.805.514.000.00
2. 1. 2. 5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.051.202.000.00
2. 1. 2. 6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	25.492.000.00
2 - 2	Dana Alokasi Umum	1.314.001.701.000.00
2.2. 1	Dana Alokasi Umum	1.314.001.701.000,00
2.2. 1. 1	Dana Alokasi Umum	1.314.001.701.000.00
2 . 3	Dana Alokasi Khusus	470.482.611.000.00
2 . 3. 1	Dana Alokasi Khusus	132.188.639.000,00
2 . 3. 1. 1	DAK Pendidikan	9.033.973.000.00
2 . 3. 1.2	DAK Kesehatan	86.088.391.000.00
2 . 3. 1. 3	DAK Infrastruktur Jalan	22.689.020.000,00
2.3. 1. 4	DAK Infrastruktur Irigasi	7.465.010.000,00
2 . 3. 1. 5	DAK Infrastruktur Air Minum	3.640.775.000,00
2 . 3. 1. 6	DAK Kelautan dan Perikanan	1.844.381.000.00
2 . 3. 1. 7	DAK Infrastruktur Sanitasi	1.427.089.000,00
2. 3. 2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	336.293.972.000.00

1.2.3	2.	1	DAK Non Fisik BOP PAUD	38.265.600.000,00
1.2.3	2.	2	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	276.351.510.000,00
1.2.3	2.	3	DAK Non Fisik Bantuan Ops Kesehatan & Bantuan Ops Keluarga Berencana	16.463.170.000,00
1.2.3	2.	4	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	3.894.000.000,00
1.2.3	2.	5	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	1.123.610.000,00
1.2.3	2.	6	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adm Kependudukan	2.196.082.000,00
1.3			Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	600.258.343.092,00
1.3.1			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	330.752.731.092,00
1.3.1	1		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	330.752.731.092,00
1.3.1	1.	1	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	107.163.285.060,00
1.3.1	1.	2	Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	83.644.686.312,00
1.3.1	1.	3	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	95.970.417.720,00
1.3.1	1.	4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.132.651.968,00
1.3.1	1.	5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	42.841.690.032,00
1.3.2			Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	269.430.612.000,00
1.3.2	1		Dana Penyesuaian	269.430.612.000,00
1.3.2	1.	1	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00
1.3.2	1.	2	Dana Desa	261.930.612.000,00
1.3.3			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000,00
1.3.3	1		Bantuan Keuangan Dari Provinsi	75.000.000,00
1.3.3	1.	1	Bantuan Keuangan Jalin Matra	75.000.000,00
			Jumlah PENDAPATAN DAERAH	3.850.639.404.011,04
2.			BELANJA	4.269.179.372.259,04
2.1			Belanja Tidak Langsung	2.364.632.967.880,04
2.1			Belanja Pegawai	1.586.718.027.514,74
2.1		1	Gaji dan Tunjangan	1.345.910.722.813,74
2.1	1.	1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	703.607.156.003,60
2.1	1.	2	Tunjangan Keluarga	68.730.331.567,95
2.1	1.	3	Tunjangan Jabatan	12.798.840.185,76
2.1	1.	4	Tunjangan Fungsional	50.590.779.742,00
2.1	1.	5	Tunjangan Fungsional Umum	11.615.126.732,60
2.1	1.	6	Tunjangan Beras	38.948.960.625,90
2.1	1.	7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.314.872.544,30
2.1	1.	8	Pembulatan Gaji	18.320.547,10
2.1	1.	9	Iuran Asuransi Kesehatan	21.151.764.680,11

2 . 1	. 1. 1.10	Uang Paket	115.000.000,00
2 . 1	. 1. 1.11	Tunjangan Badan Musyawarah	38.400.000,00
2 . 1	1. 1.12	Tunjangan Komisi	75.000.000,00
2 . 1	1. 1.13	Tunjangan Badan Anggaran	38.400.000,00
2 . 1	1. 1.14	Tunjangan Badan Kehormatan	12.000.000,00
2 . 1	1. 1.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	70.000.000,00
2 . 1	1. 1.16	Tunjangan Perumahan	6.640.800.000,00
2 . 1	1. 1.17	Uang Ouka /Tewas	47.100.000,00
2 . 1	1. 1.18	Uang Jasa Pengabdian	25.000.000,00
2 . 1	1. 1.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	500.000.000,00
2 . 1	1. 1.20	Tunjangan Profesi Guru PNSD	414.754.952.542,00
2 . 1	1. 1.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	3.817.917.642,42
2 . 1	1. 2	Tambahan Penghasilan PNS	197.849.520.001,00
2 . 1	1. 2. 1	TPP berdasarkan beban kerja	107.584.370.001,00
2 . 1	1. 2. 2	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	307.500.000,00
2 . 1	1. 2. 3	TPP pertimbangan obyektif benip Penunjang Uang Makan	75.885.000.000,00
2 . 1	1. 2. 4	Tambahan penghasilan guru PNSD	12.949.040.000,00
2 . 1	1. 2. 5	Tunjangan khusus guru	1.123.610.000,00
2 . 1	1. 3	Belanja Penenmaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.963.000.000,00
2 . 1	1. 3. 1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.000.000.000,00
2 . 1	1. 3. 2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	1.963.000.000,00
2.1.	1. 4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	32.248.750.000,00
2 . 1	1. 4. 1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	32.248.750.000,00
2 . 1	1. 5	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	4.746.034.700,00
2 . 1	1. 5. 1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.746.034.700,00
2 . 1	2	Belanja Hibah	150.112.571.000,00
2.1.	2. 1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	3.305.492.500,00
2 . 1	2. 1. 1	Hibah kepada Polres Sidoarjo	2.605.492.500,00
2 . 1	2. 1. 2	Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo	400.000.000,00
2.1.	2. 1. 3	Hibah kepada KPU	300.000.000,00
2.1.	2. 2	Belanja Hibah Kepada Masyarakat	139.312.976.000,00
2.1.	2. 2. 1	Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian	490.000.000,00
2 . 1	2. 2. 2	Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan	128.339.976.000,00
2.1.	2. 2. 3	Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan	583.000.000,00
2.1.	2. 2. 4	Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian	450.000.000,00

2 . 1 . 2 . 2 . 5	Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional	9.450.000.000,00
2 . 1 . 2 . 3	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	7.494.102.500,00
2.1.2.3.1	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	7.494.102.500,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	41.911.200.000,00
2 . 1 . 3 . 1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat	6.246.425.000,00
2 . 1 . 3 . 1 . 1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat	6.246.425.000,00
2 . 1 . 3 . 2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	33.235.500.000,00
2.1.3.2.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan	33.235.500.000,00
2 . 1 . 3 . 3	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	2.429.275.000,00
2.1.3.3.1	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	2.429.275.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	96.942.365.900,00
2 . 1 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79.497.500.000,00
2.1.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79.497.500.000,00
2 - 1 . 4 . 2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.492.069.400,00
2 . 1 . 4 . 2 . 1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.492.069.400,00
2 . 1 . 4 . 3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Proptnsi	7.952.796.500,00
2 . 1 . 4 . 3 . 1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Propinsi	7.952.796.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	485.948.803.465,30
2 . 1 . 5 . 1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	484.797.733.270,30
2 . 1 . 5 . 1 . 1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	483.632.533.270,30
2 . 1 . 5 . 1 . 2	Belanja bantuan keuangan kepada RT/RW Kelurahan	1.165.200.000,00
2 . 1 . 5 . 2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.151.070.195,00
2.1.5.2. 1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	85.338.162,00
2 . 1 . 5 . 2 . 2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	310.977.948,00
2 . 1 . 5 . 2 . 3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)	140.771.105,00
2 . 1 . 5 . 2 . 4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan	179.137.595,00
2 . 1 . 5 . 2 . 5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar	80.350.813,00
2 . 1 . 5 . 2 . 6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	71.411.804,00
2 . 1 . 5 . 2 . 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	162.189.102,00
2 . 1 . 5 . 2 . 8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura	30.914.957,00
2.1.5.2.9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem	44.867.266,00
2.1.5. 2.10	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	20.044.943,00
2.1.5. 2.11	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)	17.452.182,00
2.1.5. 2.12	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKPI	7.614.318,00

2-1.6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000.00
2 . 1 . 6. 1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000.00
2 . 1 . 6. 1. 1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000.00
2 . 2	Belanja Langsung	1.904.546.404.379,00
2.2-1	Belanja Pegawai	124.840.902.548.00
2.2.1.1	Honorarium PNS	48.922.623.600.00
2.2.1.1.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.942.750.000.00
2.2.1.1.2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.851.355.000.00
2.2.1.1.3	Honorarium Pengelola Keuangan	9.046.058.600.00
2.2.1.1.4	Belanja Pegawai BLUD	33.082.46a.000.00
2.2.1.2	Honorarium Non PNS	39.971.548.285,00
2 . 2 . 1. 2. 1	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap (Kontrak data Base)	34.847.448.285.00
2 . 2 . 1. 2. 2	Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus	5.124.100.000.00
2.2.1.3	Uang Lembur	2.059.843.650,00
2 . 2 . 1. 3. 1	Uang Lembur PNS	1.710.556.250.00
2 . 2 . 1. 3. 2	Uang Lembur Non PNS	205.198.400,00
2 . 2 . 1. 3. 3	Uang Makan Lembur	144.089.000.00
2-2.1.4	Belanja Pegawai Dana BOS Oaerah	30.872.250.000.00
2 . 2 . 1. 4. 1	Belanja Pegawai Dana BOS	30.872.250.000.00
2.2.1.5	Belanja Pegawai BLUD	3.014.637.013.00
2.2.1.5. 1	Belanja Pegawai BLUD	3.014.637.013.00
2.2-2	Belanja Barang dan Jasa	868.222.260.662,00
2 • 2. 2. 1	Belanja Bahan Pakai Habis	73.288.946.187.00
2 . 2 . 2. 1. 1	Belanja alat tulis kantor	8.653.610.039.00
2 . 2 . 2. 1. 2	Belanja dokumen/ administrasi tender	50.000.000,00
2 . 2 . 2. 1. 3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.131.106.600,00
2.2.2.1.4	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	260.544.900,00
2.2.2.1.5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.943.330.420.00
2 . 2 . 2. 1. 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.510.272.075,00
2.2.2. 1. 7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	43.600.000.00
2.2.2.1.8	Belanja pengisian tabung gas	49.080.000,00
2.2.2.1.9	Belanja obat-obatan	12.832.294.000,00
2 . 2 . 2. 1.10	Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi	919.183.300,00
2.2.2. 1.11	Belanja Barang Dan Jasa BLUD	14.895.924.853,00
2.2.2.2	Belanja Bahan/Material	33.212.155.575.00

2 . 2 . 2. 2. 1	Belanja bahan baku bangunan	7.035.895.000,00
2 . 2 . 2. 2. 2	Belanja bahan/bibit tanaman	856.122.500,00
2 . 2 . 2. 2. 3	Belanja bibit ternak	326.850.000,00
2 . 2 . 2. 2. 4	Belanja bahan obat-obatan	431.747.500,00
2 . 2 . 2. 2. 5	Belanja bahan kimia	2.573.121.950,00
2 . 2 . 2. 2. 6	Belanja bahan Penghargaan/hadiah	2.542.108.000,00
2 . 2 . 2. 2. 7	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi	9.478.824.800,00
2 . 2 . 2. 2. 8	Belanja bahan perlertgkapan pasien	404.985.000,00
2 . 2 . 2. 2. 9	Belanja bahan makanan ternak	419.987.500,00
2.2.2. 2.10	Belanja bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat	49.189.800,00
2.2.2. 2.11	Belanja bahan perlertgkapan perbengkelan	4.000.000,00
2.2.2. 2.12	Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga	74.090.000,00
2.2.2. 2.13	Belanja bahan dekorasi gedung	65.150.000,00
2.2.2. 2.14	Belanja bahan pelatihan/sostalisasi	6.050.376.725,00
2.2.2. 2.15	Belanja bahan perlengkapan/peralatan perikanan	176.365.000,00
2.2.2. 2.16	Belanja bahan pangan	855.240.000,00
2.2.2. 2.17	Belanja bahan kebutuhan pokok	757.840.000,00
2.2.2. 2.18	Belanja bahan peralatan dapur	31.850.000,00
2.2.2. 2.19	Belanja bahan peralatan keamanan	118.500.000,00
2 . 2 . 2. 2.20	Belanja bahan peralatan kedokteran	72.130.000,00
2.2.2. 2.21	Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertanian	37.500.000,00
2 . 2 . 2. 2.22	Belanja bahan peralatan rumah tangga	99.272.000,00
2.2.2. 2.23	Belanja bahan bacaan	63.200.000,00
2 . 2 . 2. 2.24	Belanja bahan peralatan peraga edukatif	597.809.800,00
2.2.2. 2.25	Belanja bahan makanan dan minuman pasien	90.000.000,00
2 - 2 . 2. 3	Belanja Jasa Kantor	149.681.135.280,00
2.2.2.3. 1	Belanja telepon	2.178.571.500,00
2 . 2 . 2. 3. 2	Belanja air	998.523.600,00
2 . 2 . 2. 3. 3	Belanja listrik	66.182.014.100,00
2 . 2.2. 3. 4	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	233.000.000,00
2 . 2 . 2. 3. 5	Belanja sural kabar/majalah	734.539.000,00
2 . 2 . 2. 3. 6	Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang	3.948.650.000,00
2 . 2 . 2. 3. 7	Belanja paket/pengiriman	53.700.000,00
2 . 2 . 2. 3. 8	Belanja Sertifikasi	1.047.900.000,00
2 . 2 . 2. 3. 9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	108.580.000,00

2 . 2 . 2. 3.10	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum	1.200.000,00
2.2.2. 3.11	Belanja jasa pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga	375.910.250,00
2.2.2. 3.12	Belanja luran kepada Forum - Forum/lembaga	47.400.000,00
2.2.2. 3.13	Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium	1.241.250.000,00
2.2.2. 3.14	Belanja jasa Pelayanan	123.568.000,00
2.2.2. 3.15	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor	7.572.708.000,00
2.2.2. 3.16	Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor	5.190.707.580,00
2.2.2. 3.17	Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Busem	766.200.000,00
2.2.2. 3.18	Betanja jasa /Tenaga keqa pengolaan pertanian dan perikanan	1.444.420.000,00
2.2.2. 3.19	Belanja jasa /Tenaga keija membantu pengelola KB Desa	3.140.256.000,00
2 . 2 . 2. 3.20	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran	3.822.763.250,00
2 . 2 . 2. 3.21	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin	545.306.200,00
2 . 2 . 2. 3.22	Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir	6.634.800.000,00
2 . 2 . 2. 3.23	Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Perintasan KA	976.800.000,00
2 . 2 . 2. 3.24	Belanja Jasa/Tenaga Teknis	4.906.270.000,00
2 . 2 . 2. 3.25	Belanja Jasa/Tenaga Sosial	537.600.000,00
2 . 2 . 2. 3.26	Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar	10.126.942.000,00
2 . 2 . 2. 3.27	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Rusunawa	1.474.172.000,00
2 . 2 . 2. 3. 28	Belanja Jasa/Tenaga Kader Kesehatan	194.540.000,00
2 . 2 . 2. 3.29	Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan	7.920.000.000,00
2.2.2. 3.30	Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan	5.860.800.000,00
2.2.2. 3.31	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Atat Berat	315.200.000,00
2.2.2. 3.32	Belanja Retribusi	10.000.000,00
2 . 2 . 2. 3.33	Belanja Jasa Angkut Barang	60.000.000,00
2.2.2. 3.34	Belanja Jasa/Tenaga Pemadam Kebakaran	3.174.000.000,00
2 . 2 . 2. 3.35	Belanja Jasa/Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan	2.771.880.000,00
2 . 2 . 2. 3.36	Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Latu Lintas	1.583.400.000,00
2 . 2 . 2. 3.37	Betanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.044.515.400,00
2 . 2 . 2. 3.38	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Arsip/Perpustakaan	497.450.000,00
2.2.2. 3.39	Belanja jasa pengelolaan sampah medis	312.197.600,00
2.2.2. 3.40	Belanja jasa loundry	6.000.000,00
2.2.2. 3.11	Belanja pendaftaran perkara	7.000.000,00
2 . 2.2. 3.12	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Ambulance	454.000.800,00
2 . 2 . 2 . 3.13	Belanja jasa/tenaga penjaga makam	8.400.000,00
2 . 2 . 2 . 3.14	Belanja jasa/tenaga pengawalan	48.000.000,00

2.2.2.4	Belanja Premi Asuransi	850.000.000,00
2 . 2 . 2. 4. 1	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	750.000.000.00
2 . 2 . 2. 4. 2	Belanja Premi Asuransi Parkir Berlangganan	100.000.000,00
2 * 2 . 2. 5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.513.458.581,00
2 . 2 . 2. 5. 1	Belanja Jasa Service	2.111.190.000.00
2 . 2 . 2. 5. 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.079.183.581.00
2 . 2 . 2. 5. 3	Belanja Bahan pelumas	1.146.870.000.00
2 . 2 . 2. 5. 4	Belanja Jasa KIR	18.600.000,00
2 . 2 . 2. 5. 5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.104.115.000,00
2 . 2 . 2. 5. 6	Belanja perlengkapan kendaraan bermotor	53.500.000,00
2 . 2. 2. 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.646.748.287,00
2 . 2 . 2. 6. 1	Belanja cetak	13.714.012.180.00
2 . 2 . 2. 6. 2	Belanja Penggandaan	2.932.736.107,00
2.2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.538.010.800,00
2.2.2.7. 1	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	7.000.000,00
2 . 2 . 2. 7. 2	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.274.510.800,00
2 . 2 . 2. 7. 3	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	256.000.000,00
2 . 2 . 2. 7. 4	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	500.000.00
2 . 2 . 2. 8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.109.950.000,00
2 . 2 . 2. 8. 1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.098.550.000.00
2 . 2 . 2. 8. 2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	11.400.000,00
2 . 2 . 2. 9	Belanja Sewa Alat Berat	110.000.000,00
2 . 2 . 2. 9. 1	Belanja sewa Eskavator	60.000.000,00
2 . 2 . 2. 9. 2	Belanja sewa Buldoser	50.000.000,00
2 . 2 . 2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.525.671.900.00
2.2. 2.10. 1	Belanja sewa meja kursi	642.645.000.00
2.2. 2.10. 2	Belanja sewa komputer/printer/UPS	7.500.000.00
2.2. 2.10. 3	Belanja sewa proyektor	16.500.000,00
2.2. 2.10. 4	Belanja sewa generator	235.250.000,00
2.2. 2.10. 5	Belanja sewa tenda	1.514.877.500,00
2.2. 2.10. 6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	536.350.000,00
2.2. 2.10. 7	Belanja sewa Sound System	764.048.800.00
2.2. 2.10. 8	Belanja sewa Tanaman Hias	82.000.000,00
2.2. 2.10. 9	Belanja sewa alat musik	86.335.600,00
2.2. 2.10.10	Belanja sewa pengharum ruangan	20.000.000,00

2.2. 2.10.11	Belanja sewa dekorasi	1.340.450.000,00
2.2. 2.10.12	Belanja sewa stand pameran	1.007.165.000,00
2.2. 2.10.13	Belanja sewa peralatan pelatihan	112.000.000,00
2.2. 2.10.14	Belanja sewa server	95.000.000,00
2.2. 2.10.15	Belanja sewa peralatan keamanan	25.000.000,00
2.2. 2.10.16	Belanja sewa toilet portable	14.000.000,00
2.2. 2.10.17	Belanja sewa alat pendingin	15.750.000,00
2.2. 2.10.18	Belanja sewa panggung	10.800.000,00
2.2. 2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	35.601.728.400,00
2.2. 2.11. 1	Belanja makanan dan minuman rapat	26.071.929.900,00
2.2. 2.11. 2	Belanja makanan dan minuman tamu	2.221.740.000,00
2.2. 2.11. 3	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	334.910.000,00
2.2. 2.11. 4	Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH	330.000.000,00
2.2. 2.11. 5	Belanja makanan dan minuman petugas khusus	244.649.000,00
2.2. 2.11. 6	Belanja makanan dan minuman tambahan anak sekolah	15.000.000,00
2.2. 2.11. 7	Belanja makanan dan minuman tambahan pendenta kurang gizi	1.252.025.000,00
2.2. 2.11. 8	Belanja makanan dan minuman tambahan penderita terpapar penyakit	127.600.000,00
2.2. 2.11. 9	Belanja makanan dan minuman tambahan posyandu balita dan usita	148.850.000,00
2.2. 2.11.10	Belanja makanan dan minuman warga terkena dampak/bencana Hngkungan	156.250.000,00
2.2. 2.11.11	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.694.274.500,00
2.2. 2.11.12	Belanja makanan dan Minuman Shelter	4.500.000,00
2.2. 2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	710.050.000,00
2.2. 2.12. 1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	88.800.000,00
2.2. 2.12. 2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	231.750.000,00
2.2. 2.12. 3	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	147.500.000,00
2.2. 2.12. 4	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	114.200.000,00
2.2. 2.12. 5	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	127.800.000,00
2.2. 2.13	Belanja Pakaian Kerja/Pertengkapan Kerja Lapangan	738.121.800,00
2.2. 2.13. 1	Belanja pakaian kerja lapangan	526.391.800,00
2.2. 2.13. 2	Belanja sepatu kerja lapangan	141.250.000,00
2.2. 2.13. 3	Befanja kelengkapan pakaian kerja.	70.480.000,00
2.2. 2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.468.796.600,00
2.2. 2.14. 1	Belanja pakaian adat daerah	17.600.000,00
2.2. 2.14. 2	Belanja pakaian batik tradisional	377.500.000,00
2.2. 2.14. 3	Belanja pakaian olahraga	816.695.000,00

2.2. 2.14. 4	Belanja pakaian khusus	257.001.600,00
2.2. 2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.806.499.926,00
2.2. 2.15. 1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.757.002.953,00
2.2. 2.15. 2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.688.969.773,00
2.2. 2.15. 3	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1.019.322.500,00
2.2. 2.15. 4	Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta	8.220.204.700,00
2.2. 2.15. 5	Belanja pengiriman Tim Petugas Haji Daerah (TPHD)	121.000.000,00
2 • 2. 2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	44.850.000,00
2.2. 2.16. 1	Belanja biasiswa belajar S1	44.850.000,00
2.2. 2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	8.937.033.000,00
2.2. 2.17. 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	783.050.000,00
2.2. 2.17. 2	Belanja Sosialisasi	2.079.150.000,00
2.2. 2.17. 3	Belanja Bimbingan Teknis	2.314.792.500,00
2.2. 2.17. 4	Belanja Pengiriman Pelatihart/Bimbingan Teknis	3.760.040.500,00
2.2. 2.18	Belanja Pemeliharaan	54.297.473.665,00
2.2. 2.18. 1	Belanja Pemeliharaan Jalan	14.750.665.677,00
2.2. 2.18. 2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.350.000.000,00
2.2. 2.18. 3	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan saluran Drainase	8.300.450.000,00
2.2. 2.18. 4	Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas	556.545.000,00
2.2. 2.18. 5	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	6.469.497.614,00
2.2. 2.18. 6	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan	520.000.000,00
2.2. 2.18. 7	Belanja Pemeliharaan Gedung Gudang	330.000.000,00
2.2. 2.18. 8	Belanja Pemeliharaan Rumah Pompa/Pompa Busem	1.121.400.000,00
2.2. 2.18. 9	Belanja Pemeliharaan Pertengkapan Kantor	1.873.457.074,00
2.2. 2.18.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.333.242.500,00
2.2. 2.18.11	Belanja Pemeliharaan Meubelair	278.300.000,00
2.2. 2.18.12	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat (Traktor, bulldozer, stoom wales, eskavator)	2.917.440.000,00
2.2. 2.18.13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat generator/ genset	162.350.000,00
2.2. 2.18.14	Belanja Pemeliharaan Alat alat Kedokteran	5.900.000,00
2.2. 2.18.15	Bejanja Pemeliharaan Alat alat Kesehatan	74.915.000,00
2.2. 2.18.16	Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman	486.445.000,00
2.2. 2.18.17	Belanja pemeliharaan Incenator/TPS	486.800.000,00
2.2. 2.18.18	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana Olaha Raga.	2.842.245.000,00
2.2. 2.18.19	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	336.150.000,00
2.2. 2.18.20	Belanja Pemeliharaan Terminal	50.000.000,00

2.2. 2.18.21	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (traffic light, rambu-rambu lalu lintas)	300.000.000,00
2 . 2. 2.18.22	Belanja Pemeliharaan Pasar	540.000.000,00
2 . 2. 2.18.23	Belanja Pemeliharaan Saluran Pembuangan	5.150.250.000,00
2 . 2. 2.18.24	Belanja Pemeliharaan Instalasi air bersih/air minum	34.500.000,00
2.2. 2.18.25	Belanja Pemeliharaan alat-alat laboratorium	105.000.000,00
2.2. 2.18.26	Belanja Pemeliharaan Tower	243.500.000,00
2.2. 2.18.27	Belanja Pemeliharaan Jaringan komputer/wave LAN/internet	1.119.256.400,00
2.2. 2.18.28	Belanja Pemeliharaan software	632.119.400,00
2.2. 2.18.29	Belanja Pemeliharaan alat pemadam kebakaran	25.500.000,00
2.2. 2.18.30	Belanja Pemeliharaan Arsip/Bahan Pustaka	91.645.000,00
2.2. 2.18.31	Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	759.900.000,00
2 . 2. 2.18.32	Belanja pemeliharaan halte/shelter	50.000.000,00
2.2. 2.19	Belanja Jasa Konsultansi	23.047.951.320,00
2.2. 2.19. 1	Belanja jasa Konsultansi Penelitian	2.232.254.520,00
2.2. 2.19. 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.437.379.500,00
2.2. 2.19. 3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.288.384.300,00
2.2. 2.19. 4	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan	9.089.933.000,00
2-2. 2.20	Belanja Barang Dana Bos Daerah	41.163.006.000,00
2 . 2 . 2.20. 1	Belanja Barang Dana Bos	41.163.006.000,00
2 . 2 . 2.21	Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	714.093.000,00
2 . 2. 2.21. 1	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	714.093.000,00
2-2. 2.22	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat/Pihak Ketiga	4.345.000.000,00
2.2. 2.22. 1	Belanja Barang yang akan dijual kepada masyarakat	4.345.000.000,00
2-2. 2.23	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	370.000.000,00
2.2. 2.23. 1	Belanja jasa pemeriksaan / Check Up Kesehatan	370.000.000,00
2 . 2 . 2.24	Belanja Penyedia Jasa	8.415.725.000,00
2 . 2 , 2.24. 1	Belanja jasa bongkar reklame	100.000.000,00
2 . 2. 2.24. 2	Belanja penyedia jasa kebersihan (cleaning service)	5.852.650.000,00
2.2. 2.24. 3	Belanja penyedia jasa keamanan kantor	1.365.000.000,00
2 . 2 . 2.24. 4	Belanja jasa perawatan lingkungan	10.000.000,00
2.2. 2.24. 5	Belanja jasa pertunjukan kesenian	1.088.075.000,00
2.2. 2.25	Belanja barang dan jasa BLUD	292.939.149.141,00
2 . 2 . 2.25. 1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	292.939.149.141,00
2 . 2 . 2.26	Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin	15.000.000.000,00
2 . 2 . 2.26. 1	Belanja Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	15.000.000.000,00

2 . 2 . 2.27	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.497.707.200,00
2 . 2 . 2.27. 1	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.005.550.000,00
2.2. 2.27. 2	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	11.492.157.200,00
2 . 2 . 2.28	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	969.452.500,00
2 . 2 . 2.28. 1	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	118.452.500,00
2 . 2 . 2.28. 2	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	851.000.000,00
2 . 2 . 2.29	Belanja Khusus Pengawasan	3.679.546.500,00
2 . 2 . 2.29. 1	Uang saku pelaksanaan pengawasan internal berkala	2.999.146.500,00
2.2. 2.29. 2	Uang saku penanganan kasus di lingkungan pemerintah daerah	321.300.000,00
2.2. 2.29. 3	Uang saku pengawasan tindak lanjut hasil temuan	189.000.000,00
2 . 2 . 2.29. 4	Uang saku pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur	170.100.000,00
2.2.3	Belanja Modal	911.483.241.169,00
2 . 2 . 3. 1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	26.745.300.000,00
2 . 2 . 3. 1. 1	Belanja modal Pengadaan tanah kantor	5.000.000.000,00
2 . 2 . 3. 1. 2	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	10.000.000.000,00
2 . 2 . 3. 1. 3	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan	1.245.300.000,00
2 . 2 . 3. 1. 4	Belanja modal Pengadaan Tanah sarana umum pelebaran jalan	10.000.000.000,00
2.2.3.1.5	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum dan serba guna	500.000.000,00
2 . 2 . 3. 2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	19.652.360.000,00
2 . 2 . 3. 2. 1	Belanja modal Pengadaan traktor	189.000.000,00
2 . 2 . 3. 2. 2	Belanja modal Pengadaan eskavator	9.298.000.000,00
2 . 2 . 3. 2. 3	Belanja modal Pengadaan dump truk	5.966.860.000,00
2 . 2 . 3. 2. 4	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	1.310.850.000,00
2 . 2 . 3. 2. 5	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	1.236.350.000,00
2 . 2 . 3. 2. 6	Belanja modal pengadaan ponton	1.651.300.000,00
2 . 2 . 3. 3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	17.083.925.000,00
2 . 2 . 3. 3. 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	7.451.300.000,00
2 . 2 . 3. 3. 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	994.000.000,00
2 . 2 . 3 . 3 . 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	800.000.000,00
2 . 2 . 3 . 3 . 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	404.200.000,00
2 . 2 . 3. 3. 5	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks	550.000.000,00
2 . 2 . 3. 3. 6	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	656.500.000,00
2 . 2 . 3. 3. 7	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	2.007.475.000,00
2 . 2 . 3. 3. 8	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran	2.107.200.000,00

2 . 2 . 3 . 3 . 9	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	2.113.250.000.00
2 . 2 . 3 . 4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	422.600.000.00
2 . 2 . 3 . 4 . 1	Belanja modal Pengadaan gerobak	221.050.000,00
2 . 2 . 3 . 4 . 2	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	201.550.000.00
2 • 2 . 3 . 5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	30.000.000,00
2 . 2 . 3 . 5 . 1	Belanja modal Pengadaan perahu karet	30.000.000.00
2 . 2 . 3 . 6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.100.000.00
2 . 2 . 3 . 6 . 1	Belanja modal Pengadaan mesin poles	4.100.000,00
2 • 2 . 3 . 7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	513.550.000,00
2.2.3.7. 1	Belanja modal pengadaan peralatan pemotongan hewan	164.050.000,00
2 . 2 . 3 . 7 . 2	Belanja modal alat tanam/panen padi	349.500.000.00
2.2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.364.112.500.00
2 . 2 . 3 . 8 . 1	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	15.750.000.00
2 . 2 . 3 . 8 . 2	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	21.000.000.00
2 . 2 . 3 . 8 . 3	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	28.500.000.00
2 . 2 . 3 . 8 . 4	Belanja modal pengadaan pendingtn ruangan	809.212.500,00
2 . 2 . 3 . 8 . 5	Belanja modal pengadaan vacuum cleaner	11.000.000,00
2 . 2 . 3 . 8 . 6	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput/Kayu	192.500.000.00
2 . 2 . 3 . 8 . 7	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	149.450.000.00
2 . 2 . 3 . 8 . 8	Belanja modal pengadaan mesin absensi	71.000.000,00
2 . 2 . 3 . 8 . 9	Belanja modal pengadaan peralatan pemadam kebakaran	11.000.000,00
2.2.3. 8.10	Belanja modal pengadaan tandon air	2.200.000,00
2.2.3. 8.11	Belanja modal pengadaan staples besar	1.500.000,00
2.2.3. 8.12	Belanja modal pengadaan mesin antrian	25.000.000,00
2.2.3. 8.13	Belanja modal pengadaan barcode reader	12.500.000,00
2.2.3. 8.14	Belanja modal pengadaan finger print scanner	13.500.000.00
2-2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor	1.979.118.420.00
2 . 2 . 3 . 9 . 1	Belanja modal Pengadaan almari	170.700.000,00
2 . 2 . 3 . 9 . 2	Belanja modal Pengadaan brankas	26.000.000,00
2 . 2 . 3 . 9 : 3	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	29.500.000,00
2 . 2 . 3 . 9 . 4	Belanja modal Pengadaan white board	4.400.000.00
2 . 2 . 3 . 9 . 5	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	25.500.000.00
2 . 2 . 3 . 9 . 6	Belanja modal pengadaan papan Instansi	230.570.000.00
2 . 2 . 3 . 9 . 7	Belanja modal pengadaan TV/RadioHape	85.939.700.00
2 . 2 . 3 . 9 . 8	Belanja modal pengadaan tangga	5.700.000.00

2 . 2 . 3 . 9 . 9	Belanja modal pengadaan billboard	555.000.000,00
2.2.3. 9.10	Belanja modal pengadaan tempat sampah	605.650.000.00
2.2.3. 9.11	Belanja modal pengadaan tertda (bivak)	18.000.000.00
2.2.3. 9.12	Belanja modal pengadaan korden/karpet	143.758.720.00
2.2.3. 9.13	Belanja modal pengadaan podium	3.400.000,00
2.2.3. 9.14	Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkal Petir	75.000.000,00
2.2. 3.10	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.187.835.500,00
2.2. 3.10. 1	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	866.350.000.00
2.2. 3.10. 2	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	1.561.796.000.00
2.2. 3.10. 3	Belanja modal Pengadaan komputer note book	286.450.000.00
2.2. 3.10. 4	Belanja modal Pengadaan printer	494.290.000.00
2.2. 3.10. 5	Belanja modal Pengadaan scanner	87.250.000,00
2.2. 3.10. 6	Belanja modal Pengadaan monitor/display	10.000.000.00
2.2. 3.10. 7	Belanja modal Pengadaan CPU	10.000.000.00
2.2. 3.10. 8	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	33.600.000.00
2.2. 3.10. 9	Belanja modal pengadaan peralatan dan jaringan komputer	87.449.500.00
2.2. 3.10.10	Belanja modal pengadaan software	750.650.000.00
2.2. 3.11	Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur	1.048.653.000,00
2.2. 3.11. 1	Belanja modal Pengadaan meja kerja	176.600.000,00
2.2. 3.11. 2	Belanja modal Pengadaan meja rapat	336.907.000.00
2.2. 3.11. 3	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	91.100.000.00
2.2. 3.11. 4	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	76.800.000,00
2 . 2 . 3.11. 5	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	22.500.000.00
2.2. 3.11. 6	Belanja modal Pengadaan sofa	10.000.000,00
2.2. 3.11. 7	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	43.146.000.00
2.2. 3.11. 8	Belanja modal Pengadaan Meja Komputer	1.500.000.00
2.2. 3.11. 9	Belanja modal Pengadaan meja kursi siswa	36.800.000.00
2.2. 3.11.10	Belanja modal Pengadaan meja kursi tamu	56.300.000.00
2.2. 3.11.11	Belanja modal Pengadaan kursi tunggu	28.000.000,00
2.2. 3.11.12	Belanja modal Pengadaan Furniture ruang pelayanan	151.500.000,00
2.2. 3.11.13	Betenja modal Pengadaan Meja Pelayanan	17.500.000.00
2.2. 3.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	24.741.460.00
2.2. 3.12. 1	Belanja modal Pengadaan kompor gas	700.000.00
2.2. 3.12. 2	Belanja modal Pengadaan dispenser	11.932.500.00
2.2. 3.12. 3	Belanja modal Pengadaan kulkas	9.000.000,00

2.2. 3.12. 4	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	3.108.960,00
2.2. 3.13	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.500.000,00
2.2. 3.13. 1	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	8.500.000,00
2 . 2 . 3.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.254.213.200,00
2.2. 3.14. 1	Belanja modal Pengadaan kamera	665.835.500,00
2.2. 3.14. 2	Belanja modal Pengadaan handycam	43.847.700,00
2.2. 3.14. 3	Belanja modal Pengadaan proyektor	178.400.000,00
2.2. 3.14. 4	Belanja modal Pengadaan Audio Video	121.500.000,00
2.2. 3.14. 5	Belanja modal Pengadaan perlengkapan Audio Video	22.000.000,00
2.2. 3.14. 6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sound System	219.130.000,00
2.2. 3.14. 7	Belanja Modal Pengadaan DVD	2.400.000,00
2.2. 3.14. 8	Belanja Modal Audio Link dan Tiang Mic	1.100.000,00
2-2. 3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	217.550.000,00
2.2. 3.15. 1	Belanja modal Pengadaan telepon	7.050.000,00
2.2. 3.15. 2	Belanja modal Pengadaan faximili	4.500.000,00
2.2. 3.15. 3	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	30.000.000,00
2.2. 3.15. 4	Belanja modal Pengadaan radio UHF	135.000.000,00
2.2. 3.15. 5	Belanja Modal Pengadaan PABX	41.000.000,00
2-2. 3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.961.450.000,00
2.2. 3.16. 1	Belanja modal Pengadaan timbangan	49.500.000,00
2.2. 3.16. 2	Belanja modal Pengadaan alat GPS	53.000.000,00
2.2. 3.16. 3	Belanja Modal Alat Ukur Meteran Gtinding	1.500.000.000,00
2.2. 3.16. 4	Belanja modal Pengadaan Distometer	18.000.000,00
2.2. 3.16. 5	Belanja modal Pengadaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	340.950.000,00
2.2. 3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	908.790.000,00
2.2. 3.17. 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	694.485.000,00
2.2. 3.17. 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT	6.540.000,00
2.2. 3.17. 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	67.500.000,00
2.2. 3.17, 4	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis	136.550.000,00
2.2. 3.17. 5	Belanja modal pengadaan alat pemeriksaan psikologi	3.715.000,00
2.2. 3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.637.690.000,00
2.2. 3.18. 1	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	1.390.500.000,00
2.2. 3.18. 2	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	40.000.000,00
2.2. 3.18. 3	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	207.190.000,00
2.2. 3.19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	322.961.501.504,00

2.2. 3.19. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	322.961.501.504.00
2 - 2. 3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	11.278.200.000,00
2.2. 3.20. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	11.278.200.000.00
2.2. 3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	129.832.599.157,00
2.2. 3.21. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	39.517.047.005.00
2.2. 3.21. 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	8.118.049.000.00
2.2. 3.21. 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	39.988.928.152.00
2.2. 3.21. 4	Belanja modal Pengadaan konstruksi dermaga	437.800.000,00
2.2. 3.21. 5	Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan	41.570.775.000.00
2.2. 3.21. 6	Belanja modal pengadaan plengsengan	200.000.000.00
2 . 2 . 3.22	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	1.943.145.000,00
2.2. 3.22. 1	Belanja modal Pengadaan pertengkapan jatan (traffic light rambu-rambu lalu lintas)	1.114.005.000.00
2.2. 3.22. 2	Belanja modal Pengadaan Taman	714.400.000.00
2.2. 3.22. 3	Belanja modal Pengadaan lampu penerangan jalan umum	114.740.000.00
2.2. 3.23	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	441.177.000,00
2.2. 3.23. 1	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	340.727.000.00
2.2. 3.23. 2	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	40.600.000.00
2.2. 3.23. 3	Belanja modal Pengadaan jaringan internet	49.850.000,00
2.2. 3.23. 4	Belanja modal pengadaan instalasi air	10.000.000.00
2 2. 3.24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	194.327.763.302.00
2.2. 3.24. 1	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	42.597.393.000.00
2 . 2 . 3. 24. 2	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	344.000.000.00
2.2. 3.24. 3	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	600.000.000,00
2 . 2 . 3.24. 4	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Puskesmas	22.253.219.627,00
2 . 2 . 3.24. 5	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung Sekolah	49.566.074.000.00
2.2. 3.24. 6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung terminal	162.750.000.00
2.2. 3.24. 7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pasar	5.057.860.000.00
2 . 2 . 3.24. 8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung perumahan	550.000.000.00
2.2. 3.24. 9	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pengolahan sampah	1.474.900.000,00
2.2. 3.24.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung pengolahan limbah	1.331.850.000.00
2.2. 3.24.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tempat pemakaman umum	45.000.000.00
2.2. 3.24.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi /pembelian Gedung serba guna	70.085.416.675,00
2 . 2 . 3.24.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Halte/Shelter	259.300.000.00
2 - 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	760.350.000,00
2.2. 3.25. 1	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	36.000.000,00

2.2. 3.25. 2	Belanja modal pengadaan buku bacaan perpustakaan	724.350.000,00
2 . 2 . 3.26	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000,00
2.2. 3.26. 1	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto	5.000.000.00
2 . 2 . 3.27	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	350.000.000,00
2.2. 3.27. 1	Belanja modal Pengadaan tanaman	350.000.000,00
2.2. 3.28	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	39.250.000.00
2 . 2 . 3.28. 1	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru	15.000.000.00
2 . 2 . 3.28. 2	Belanja modal Pengadaan helm	18.000.000,00
2.2. 3.28. 3	Belanja modal Pengadaan sentop/senter	1.250.000,00
2.2. 3.28. 4	Belanja Modal Pengadaan Pelampung	5.000.000,00
2 . 2 . 3.29	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	912.400.000.00
2 . 2 . 3.29. 1	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana olah raga	912.400.000.00
2.2. 3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengairan	2.252.972.200.00
2 . 2 . 3.30. 1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengairan	2.252.972.200,00
2 . 2 . 3.31	Belanja Modal BLUD	136.296.768.926,00
2 . 2 . 3.31. 1	Belanja Modal BLUD	136.296.768.926,00
2.2. 3.32	Belanja Modal Dana Bos Daerah	30.872.250.000,00
2 . 2 . 3.32. 1	Belanja Modal Dana Bos	30.872.250.000,00
2.2. 3.33	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah	165.375.000.00
2.2. 3.33. 1	Belanja Meubeuleur Perabot Ruang Ketas	165.375.000,00
	Jumlah BELANJA	4.269.179.372.259,04
	Surplus/(Defisit)	(418.539.968.248,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	418.539.968.248,00
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	431.439.968.248,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	418.539.968.248.00
3 . 1 . 1 . 1	Pelampauan Penerimaan PAD	44.327.807.997.57
3 . 1 . 1 . 1 . 1	Pajak Daerah	10.194.809.982.90
3 . 1 . 1 . 1 . 2	Retribusi Daerah	5.096.999.974.40
3 . 1 . 1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.402.996.666,35
3 . 1 . 1 . 1 . 4	Laio-lain PAD yang sah	27.631.001.373.92
3 - 1 . 1 . 2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	21.930.856.963,30
3 . 1 . 1 . 2 . 1	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya alam	17.229.719.263.30
3 . 1 . 1 . 2 . 2	Dana Alokasi Khusus	4.701.137.700.00
3 . 1 . 1 . 3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.026.094.632,90
3 . 1 . 1 . 3 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.026.094.632,90

3 • 1	.1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	377.116.922.580.83
3 . 1	. 1. 4. 1	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	87.900.695.951.80
3 . 1	. 1. 4. 2	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	8.830.487.613,60
3 . 1	. 1. 4. 3	Belanja Barartg dan Jasa	73.831.085.470.58
3 . 1	. 1. 4. 4	Belanja Modal	193.694.682.777.25
3 . 1	. 1. 4. 5	Belanja Hibah	3.216.826.005.12
3 . 1	1. 4. 6	Belanja Bantuan Sosial	3.110.241.213.60
3 . 1	1. 4. 7	Belanja Bagi Hasil	2.648.261.994,66
3 . 1	1. 4. 8	Belanja Bantuan Keuangan	2.084.641.554,22
3 . 1	1. 4. 9	Belanja Tidak Terduga	1.800.000.000,00
3. 1	2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	12.900.000.000.00
3-1.	2. 1	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	12.900.000.000.00
3 . 1	2. 1. 1	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari KUKM	8.700.000.000,00
3 . 1	2. 1. 2	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pembelian Gabah Petani	3.600.000.000,00
3.1.	2. 1. 3	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	300.000.000,00
3.1.	2. 1. 4	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	300.000.000.00
JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah			475.301.682174.60
3. 2		Pengeluaran Pembiayaan daerah	12.900.000.000,00
3.2.1		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.900.000.000.00
3-2.1.1		Badan Usaha Swasta	12.900.000.000.00
3.2.1.1.1		Usaha Kectl dan Menengah (UKM)	8.700.000.000.00
3.2.1.1.2		Pembelian Gabah Petani	3.600.000.000,00

3.2.1.1.3	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	300.000.000,00
3 . 2. 1. 1. 4	Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	300.000.000.00
	JumlahPengeluaran Pemblayaan daerah	12.900.000.000.00
	Pemblayaan Nettp	418.539.968.248.00

BUPATISIDOARJO

ttd

H.SAIFULILAH